

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Pencairan Program BPNT Salah Aturan
Entitas / Cakupan	: Kabupaten Garut
Sumber / Hal	: Pikiran Rakyat / Hal.6
Edisi	: Kamis, 31 Mei 2018

Pencairan Program BPNT Salah Aturan

GARUT, (PR).-

Pelaksanaan program bantuan pangan nontunai (BPNT) di Kabupaten Garut menyalahi ketentuan karena proses penebusan bantuan dilakukan secara kolektif oleh aparat desa dan ketua RW. Seharusnya, setiap keluarga penerima bantuan secara langsung menebus bantuan berupa beras dan telur agar bantuan tepat sasaran.

Penebusan bantuan di beberapa lokasi yang dikolektifkan oleh aparat desa, terjadi di semua desa di Kecamatan Pakenjeng. Ketua Dewan Pengurus Kecamatan Pakenjeng, Agus Rawing mengatakan, penebusan BPNT dikolektifkan oleh aparat desa masing-masing beberapa hari lalu. Alasan aparat desa agar warga tidak repot.

Agus memprotes kegiatan pengolektifan pencairan bantuan BPNT karena seharusnya warga yang langsung menggesek kartu tersebut dan tidak boleh diwakilkan. "Mengapa penggesekan kartu tidak dilakukan oleh warga langsung? Takutnya, uang di saldo sudah berpindah, tapi bantuan tidak datang," ucap Agus di Pakenjeng, Rabu (30/5/2018). Setelah kartu digesek pun, bantuan berupa beras dan telur belum juga diterima warga. Belum jelas kapan bantuan tersebut datang

Kejadian serupa terjadi di Desa Rancabango, Kecamatan Tarogong Kaler. Seorang warga RW 4, Eti (38) mengatakan, kartu BPNT telah diberikan oleh Bank Negara Indonesia sebagai pencetak kartu kepada masing-masing warga. Namun, beberapa hari kemudian, ia mendapat informasi bahwa kartu tersebut harus dikumpulkan ke ketua RW. Setelah itu, ia dan warga hanya diminta menunggu hingga bantuan beras dan telur datang. Tak jelas kapan bantuan itu akan diterima warga. Bukan hanya warga RW 4, warga RW 3 juga mengumpulkan kartu ke ketua RW.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut Elka Nurhakimah mengatakan, pengolektifan penebusan bantuan memang menyalahi ketentuan pemerintah pusat. Namun, hal itu hanya berlangsung sementara hingga program BPNT berlangsung sempurna, dari segi kesiapan agen, penyaluran kartu, dan lainnya. Pengolektifan penebusan bantuan juga untuk mempermudah warga.

Dana desa

Sementara itu, dari Majalengka dilaporkan, pemerintah pusat mulai tahun depan akan menambah anggaran untuk dana desa yang semula Rp 60 triliun per tahun menjadi Rp 73 triliun hingga Rp 80 triliun untuk 74.574 desa di Indonesia agar pertumbuhan infrastruktur dan perekonomian di desa semakin meningkat.

Hal tersebut disampaikan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo saat mengunjungi Desa Kawunghilir, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka dalam rangka jelajah Ramadan sekaligus menghadiri bazar murah, Rabu (30/5/2018). "Pemerintah pusat selama tiga tahun sudah mengucurkan dana desa hingga mencapai 187 triliun," ungkap Eko yang dikutip wartawan *Kabar Cirebon Tati Purnawati. (Rani Ummi Fadila)****